DAFTAR RUJUKAN

Buku

Suyanto. 2022. *Metode Penelitian Hukum: Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*. Gresik: Unigres Press. https://unigrespress.com/product/metode-penelitian-hukum-pengantar-penelitian-normatif-empiris-dan-gabungan/

Artikel Jurnal

Elviandri, Dana, R., Kholik, S., dan Noor, A. 2024. "Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik: Pilar Demokrasi dan Penguatan Pelembagaan Parpol dari *Conflict of Interest* dan *Abuse of Power*". *Jurnal Retentum*, 6(2), 192-201. https://doi.org/10.46930/retentum.v6i2.5030

Ghafur, J. 2024. "Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik: Tinjauan Negara Hukum dan Demokrasi". *Jurnal Litigasi*, 25(2), 407-439. https://doi.org/10.23969/litigasi.v25i2.19327

Kenawas, Y. C. 2023. "The Irony of Indonesia's Democracy: The Rise of Dynastic Politics in the Post-Suharto Era". *Asian Journal of Comparative Politics*, 9(2). https://doi.org/10.1177/20578911231195970

Mahmudi, M. 2020. "Partai Politik Sebagai Badan Hukum dalam Sistem Kepartaian di Indonesia". *Negara dan Keadilan*, 9(1), 17. https://doi.org/10.33474/hukum.v9i1.5046

Munawar, A. 2022. "Refleksi Kritis *Judicial Review* AD/ART Partai Demokrat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 P/HUM/2021". *Synotic Law: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 13-30. https://doi.org/10.56110/sl.v1i1.1

Riqiey, Baharuddin, Pramesti, A. A., dan Sakti, A. C. 2022. "Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum Parpol dalam Perspektif Demokrasi". *Jurnal Mengkaji Indonesia*, 1(1), 1-17.

Scarrow, S. E. 2021. "Intra-Party Democracy and Party Unity: Varied Rules, Varied Consequences". *Representation*, 57(1), 41-57. https://doi.org/10.1080/00344893.2020.1737193

Dokumen dan Standar Hukum Internasional

International IDEA. t.t. *Political Parties: Constitutional Roles, Recognition, Rights and Regulations*. Stockholm: International Institute for Democracy and Electoral Assistance.

https://www.idea.int/publications/catalogue/html/political-parties-constitutional-roles-recognition-rights-and

Organization for Security and Co-operation in Europe/Office for Democratic Institutions and Human Rights (OSCE/ODIHR) dan Venice Commission. 2023. *Guidelines on Political Party Regulation*. Edisi kedua. Warsawa/Strasbourg: OSCE/ODIHR. https://cdn.osce.org/sites/default/files/f/documents/8/1/538473.pdf

Dokumen dan Sumber Resmi Terkait Sistem Kepartaian Jepang

Asia-Pacific Journal: Japan Focus. 2025. "Political Scandal in Japan and the LDP Slush Fund Controversy". https://apjjf.org/

Britannica. 2025. "2025 Liberal-Democratic Party (Japan) Presidential Election". Encyclopaedia Britannica. https://www.britannica.com/event/2025-Liberal-Democratic-Party-Japan-Presidential-Election

Liberal Democratic Party of Japan. t.t. *The Constitution of the Liberal Democratic Party of Japan* [Bab XI, Pasal 81]. Tokyo: Liberal Democratic Party Headquarters. https://www.jimin.jp/english/about-ldp/constitution/104216.html

Tokyo Foundation. 2018. "The 2017 Revision of the LDP Rules and the Extension of the Party President's Term of Office". Tokyo Foundation for Policy Research. https://www.tkfd.or.jp/en/

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2). Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8). Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183). Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292). Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119). Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 612). Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Putusan Pengadilan

Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2021. *Putusan Nomor 39 P/HUM/2021 tentang Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat*. https://putusan3.mahkamahagung.go.id/

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2023. *Putusan Nomor 69/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. https://www.mkri.id/

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2025a. *Permohonan Nomor 22/PUU-XXIII/2025 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik*. https://www.mkri.id/

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2025b. *Putusan Nomor 194/PUU-XXIII/2025 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. https://www.mkri.id/

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2026a. *Putusan Nomor 191/PUU-XXIV/2026 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. https://www.mkri.id/

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2026b. *Putusan Nomor 217/PUU-XXIV/2026 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. https://www.mkri.id/

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2026c. *Permohonan Nomor 146/PUU-XXIV/2026 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. https://www.mkri.id/

Sumber Berita

CNN Indonesia. 2026. "Pembatasan Jabatan Ketum Parpol Demi Kepentingan Publik". 24 April 2026. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260424102855-32-1351510/pembatasan-jabatan-ketum-parpol-demi-kepentingan-publik

Harian Terbit. 2026. "Yuri Kemal Fadlullah Jadi Ketua Umum PBB hingga Muktamar 2030". 11 Maret 2026. https://www.harianterbit.com/

Kompas.com. 2025. "KLB Partai Gerindra: Peneguhan Kepemimpinan Prabowo Subianto". 16 Februari 2025. https://nasional.kompas.com/read/2025/02/16/08063651/klb-partai-gerindra-peneguhan-kepemimpinan-prabowo-subianto

Kompas.com. 2026. "Yusril Sebut PBB yang Sah di Bawah Ketum Yuri Kemal Fadhlullah". 29 April 2026. https://nasional.kompas.com/

Kompaspedia. 2022. "Surya Paloh: Profil dan Perjalanan Karier Politik". Kompaspedia – Litbang Kompas. https://kompaspedia.kompas.id/

Tempo. 2025a. "Megawati Kembali Terpilih Jadi Ketua Umum PDI-P dalam Kongres VI di Bali". 1 Agustus 2025. https://www.tempo.co/

Tempo. 2025b. "Prabowo Subianto Kembali Terpilih Jadi Ketua Umum Gerindra Periode 2025-2030". Februari 2025. https://www.tempo.co/

Tempo. 2025c. "Setahun Bahlil Terpilih Lewat Munas Golkar Gantikan Airlangga Hartarto". https://www.tempo.co/politik/setahun-bahlil-terpilih-lewat-munas-golkar-gantikan-airlangga-hartarto-2056196

tvOne News. 2026. "Kementerian Hukum Sahkan Kepengurusan Partai Bulan Bintang, Pj. Ketua Umum Yuri Kemal Fadlullah". 20 April 2026. https://www.tvonenews.com/